

ANALISIS KARAKTERISTIK PERMUKIMAN DI WILAYAH PESISIR

Abdul Hamid Botutihe¹, Vania Almirah L. Hambali¹, Nurul Inayah Dg Masiga¹, Wahyuni Angraini Saleh¹, Muhammad Rijal Syukri²

¹Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.

²Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo, Jl. B.J. Habibie Desa Moutong Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango

E-mail: abdulhamidbotutihe@gmail.com¹ ; muhrijalsyukri@ung.ac.id²

Abstrak

Permukiman adalah suatu kawasan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang membangun rumah pada lahan kosong sehingga menyebabkan pola penataan pada kawasan tersebut cenderung menjadi tidak beraturan. Permukiman pesisir adalah suatu lingkungan hunian yang terletak di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan yang didalamnya terdapat kegiatan penghidupan oleh kelompok permukiman tersebut yang dominan memanfaatkan potensi di wilayah pesisir dalam pemenuhan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik wilayah pesisir di Indonesia dengan menggunakan metode kajian literatur yang bersumber dari beberapa jurnal. Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara fundamental menunjuk ke arah melibatkan area keuangan lokal, area lokal harus memiliki kapasitas luar biasa untuk mengendalikan diri dalam aset para eksekutif pesisir dan lautan pada masa kemerdekaan ini. Interaksi unduhan dari otoritas publik ke masyarakat harus dipahami. Masalah lingkungan yang sering dijumpai di kawasan wisata pantai adalah masalah sampah yang mengotori pantai. Ada dua jenis sampah yang mencemari pantai, yaitu sampah dari kegiatan wisata dan sampah dari laut. Hingga saat ini permasalahan sampah di lokasi wisata pantai belum tertangani secara efektif. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove.

Kata Kunci: karakteristik; permukiman; pesisir

Abstract

Settlement is an area inhabited by a group of people who build houses on vacant land, causing the arrangement pattern in the area to tend to be irregular. Coastal settlement is a residential environment located in the area between the meeting of land and sea in which there are livelihood activities by the settlement group which dominantly utilizes the potential in the coastal area in fulfilling their needs. This study aims to determine the characteristics of coastal areas in Indonesia by using the literature review method sourced from several journals. The management of coastal and marine resources fundamentally points towards involving local financial areas, local areas must have an extraordinary capacity to control themselves in the assets of coastal and ocean executives at this time of independence. The download interaction from public authorities to communities must be understood. An environmental problem that is often encountered in coastal tourist areas is the problem of garbage that pollutes the beach. There are two types of waste that pollute the beach, namely waste from tourist activities and waste from the sea. Until now, the problem of waste in coastal tourist sites has not been handled effectively. In addition, coastal areas are also an area that inhibits the entry of large waves of sea water to land, namely with the existence of mangrove forests.

Keywords: characteristics; settlements; coastal

A. PENDAHULUAN

Permukiman pada umumnya merupakan suatu lingkungan hunian yang mempunyai fasilitas-fasilitas prasarana dan sarana didalamnya, untuk menunjang segala kegiatan pemukim yang ada didalamnya. Permukiman adalah suatu kawasan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang membangun rumah pada lahan kosong sehingga menyebabkan pola penataan pada kawasan tersebut cenderung menjadi tidak beraturan. Permukiman memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Di Indonesia hal paling kompleks yang timbul dari masalah permukiman ini yakni tumbuh dan menjamurnya kawasan permukiman-permukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik itu kota maupun kabupaten. Keberadaan permukiman kumuh meskipun tidak dikehendaki namun harus kita akui bahwa, keberadaannya sulit untuk dihindari dalam perkembangan suatu wilayah baik kota maupun kabupaten.

Wilayah Pesisir berfungsi sebagai titik persilangan antara air dan daratan. keadaan yang menempatkan wilayah pesisir di bawah tekanan dari beragam kegiatan dan peristiwa berbasis darat dan laut. Abrasi, genangan, dan banjir merupakan contoh fenomena yang terjadi di darat. Pembangunan permukiman merupakan salah satu kegiatan masyarakat. persawahan, pembangunan tambak, dan sebagai pengaruhnya terhadap ekosistem pesisir.

Batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan (Damisi et al., 2014) wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Permukiman pesisir adalah suatu lingkungan hunian yang terlatak di wilayah antara pertemuan daratan dan lautan yang didalamnya terdapat kegiatan penghidupan oleh kelompok pemukim tersebut yang dominan memanfaatkan potensi di wilayah pesisir dalam pemenuhan kebutuhan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dimana peneliti melakukan serangkaian penelitian yang melibatkan berbagai macam informasi yang valid dan sudah dibuktikan kebenarannya yaitu berasal dari beberapa buku dan jurnal. Penelitian ini disusun berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian ini, membahas tentang kondisi fisik permukiman, penggunaan lahan, aksesibilitas, dan prospek pengembangan permukiman. Dari hasil litetratur beberapa jurnal menunjukkan bahwa karakteristik permukiman di wilayah pesisir secara umum

memiliki kondisi fisik yang buruk. Hal ini disebabkan oleh faktor alam seperti abrasi, banjir, dan gempa bumi yang sering terjadi di wilayah pesisir. Selain itu, penggunaan lahan di wilayah pesisir cenderung tidak terkontrol dan banyak terjadi konflik antara pengguna lahan. Aksesibilitas juga menjadi masalah di wilayah pesisir karena infrastruktur yang kurang baik dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Meskipun demikian, terdapat prospek pengembangan permukiman di wilayah pesisir. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor pariwisata karena keindahan alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih baik dan program rehabilitasi wilayah pesisir dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir.

Tabel 1. Hasil Analisis Karakteristik permukiman pesisir indonesia

Lokasi	Karakteristik Pemukiman	Referensi
Desa Pesisir Di Kabupaten Kulonprogo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan permukimannya relatif rendah. 2. Secara umum pola sebaran permukiman adalah mengelompok dengan bentuk memanjang. 3. Ditinjau dari permanensi bangunan secara umum proporsi antara permukiman permanen dengan non permanen di daerah penelitian cenderung seimbang. 	(Marwasta & Priyono, 2016)
Kecamatan Bunaken	<p>Berdasarkan hasil penelitian, diketahui permukiman masyarakat yang berada pada kawasan pesisir memiliki karakteristik yang khas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk karakteristik fisik (alamiah) kawasan pesisir Kec. Bunaken didominasi oleh lahan perkebunan 2. Untuk karakteristik fisik permukiman (buatan) yaitu konstruksi bangunan/ rumah masyarakat pesisir adalah semi permanen 56%, dengan pola permukiman membentuk pola linear dan orientasinya menghadap ke jalan. 	(Lautetu et al., 2019)
Pemukiman pesisir pada kawasan wisata pantai alam Randusanga Indah kabupaten Brebes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan karakteristik lingkungan fisik ditunjukkan dari peningkatan kualitas permentasi jaringan jalan, peningkatan kualitas hunian, peningkatan kualitas permukiman dan peningkatan kualitas permentasi bangunan. 2. Perubahan karakteristik penggunaan permukiman sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hunian disekitar akses masuk wisata pantai. semula hanya hunian biasa beralih menjadi warung/toko/jasa karena peluang usaha yang disebabkan keberadaan kawasan wisata pantai. 	(Christiawan & Budiarta, 2017)
Desa Sangsit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar kondisi rumah tinggal dari masyarakat pesisir berada dalam kategori tidak layak huni dan cenderung bersifat kumuh 	(Christiawan & Budiarta, 2017)

	<ol style="list-style-type: none">2. halaman yang sempit, sanitasi yang rendah, fasilitas pendukung yang tidak lengkap3. tata letak yang tidak sesuai dengan peruntukan, khususnya tata letak perlengkapan melaut (Suparlan, 1995).	
Di Pesisir Pantai Pulau Naen	<ol style="list-style-type: none">1. Permukiman masyarakat berdiri pada dua lokasi. Pertama, bagian yang dibangun di darat dan kedua, permukiman yang dibangun di atas air.2. Ruang Basudara, Rumah-rumah yang terbentuk dalam satu garis memanjang sangat berkaitan dengan hubungan basudara (sedarah).3. Para-para rumah, Rumah-rumah yang berada di atas air dibangun memiliki batas yang jelas.4. Penggunaan kayu bakau sebagai pondasi rumah adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Nain.	(Dariwu & Waani, 2016)
Di Kawasan Pesisir Desa Jatirejo Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan	<ol style="list-style-type: none">1. permukiman di Kecamatan Lekok berbentuk liner panjang mengikuti panjangnya pantai yang mengarah barat ke timur.2. terdapat juga permukiman berbentuk sebanjar jalan yang mengarah utara ke selatan.3. Struktur bangunan permukiman campuran antara kayu dan semen dengan atap mayoritas menggunakan genteng.4. Bangunan permukiman terletak didarat dekat dengan pantai.5. kamar mandi pada rumah tidak memenuhi persyaratan dari segi kesehatan serta standar perencanaan kamar mandi.6. Tempat pembuangan sampah dilingkungan rumah yang tidak tersedia.	(Putri et al., 2023)

Sumber : Hasil Analisis Penelitian Terdahulu, 2022

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut secara fundamental menunjuk ke arah melibatkan area keuangan lokal, area lokal harus memiliki kapasitas luar biasa untuk mengendalikan diri dalam aset para eksekutif pesisir dan lautan pada masa kemerdekaan ini. Interaksi unduhan dari otoritas publik ke masyarakat harus dipahami. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang masih menjadi kewajiban-kewajiban pemerintah seperti pendekatan moneter aset, pengembangan kerangka kerja dan landasan, penyiapan tata ruang tepi laut, serta perangkat yang sah untuk aset para pelaksana. Meskipun ini penting untuk posisi otoritas publik, itu tidak berarti masyarakat tidak memiliki komitmen dan dukungan dalam rencana pengaturan apapun. Dengan ada komitmen daerah dan investasi, kemudian, pada saat itu, pengaturan yang matang akan menghubungi masalah asli dan tidak merugikan kepentingan umum.

Masalah lingkungan yang sering dijumpai di kawasan wisata pantai adalah masalah sampah yang mengotori pantai. Ada dua jenis sampah yang mencemari pantai, yaitu sampah dari kegiatan wisata dan sampah dari laut. Hingga saat ini permasalahan sampah di lokasi wisata pantai belum tertangani secara efektif. Sampah jika tidak dikelola dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan dan keberlanjutan kawasan wisata alam. Di sisi lain, jika dikelola dengan baik, sampah memiliki nilai potensial, seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan estetika lingkungan, serta pemanfaatan lain sebagai bahan kompos yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki lahan kritis di berbagai daerah. Di Indonesia, dan juga dapat mempengaruhi penerimaan devisa negara. Pengelolaan Sampah: mengurangi dan menangani sampah pada sumbernya, serta mengubah sampah menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri melalui 3R (Reduce, Reuse and Recycle). Sampah pinggir laut yang ada disini adalah sampah dari kawasan pusat yang muncul karena adanya kegiatan samping laut yang jumlahnya sesuai dengan jumlah tamu, jenis perkantoran penunjang perkantoran, seperti penginapan/hotel, warung makan, serta armada laut.

Manusia secara mekanis mengelolah lingkungan mereka, yang dicapai melalui masyarakat sehari-hari. misalnya, pembuangan sampah, distribusi sampah keluarga tangga, petani secara robotik memelihara sengkedan, mengairi sawah, membasmi hama, sakit dan sebagainya. Meskipun kegiatan pengendalian lingkungan adalah kebiasaan, tetapi kegiatan ini sering tidak lagi disebut sebagai pengendalian biasa karenanya mil sangat penting bagi masyarakat pesisir untuk menjaga lingkungan pesisir agar tetap terjaga itu cantik. memahami lingkungan adalah keseluruhan yang ada di sekitar orang yang mempengaruhi perbaikan gaya hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung langsung. Lingkungan dapat dibagi menjadi lingkungan biotik (tempat tinggal) sebagai contoh: manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan abiotik (mati). sering Lingkungan yang meliputi sesama manusia disebut juga lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membuat dokumen perangkat sosial yang melakukan fungsi besar dalam membentuk kepribadian seseorang.

Selain mudah mempertahankan lingkungan pesisir, sebagai manusia anda juga bisa barang/bahan bekas yang ada di lingkungan sekitar beserta karpet bekas (tidak layak pakai), cangkang kerang (dibuat sebagai hiasan tisu, kalung, peralatan makan keluarga) dan bahkan banyak barang dagangan laut yang lebih besar yang umumnya digunakan sebagai makanan bahan kerajinan sebagai keuntungan tambahan. Kerjasama masyarakat daerah dalam pengelolaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kerapian ekologis, baik iklim rumah maupun iklim tepi pantai yang bersih dan kokoh, serta memperkuat dorongan daerah setempat dalam mengikuti, menjaga dan menggarap alam. kemampuan. Selain itu, kapasitas daerah untuk menambah pemborosan para eksekutif juga akan bergantung, terutama di iklim tepi pantai. Namun dalam beberapa kasus, sifat buruk individu yang tidak peduli atau kurang peduli dalam menjawab masalah sampah akan berdampak buruk pada iklim dan sisi laut. Untuk menjaga iklim di sekitar kita, area lokal saat ini di tepi harus dikaitkan dengan pemborosan papan mulai dari keluarga. Isu kerjasama daerah merupakan bidang kajian pragmatis pekerjaan sosial atau sangat berkaitan dengan

kemampuan jaringan yang menghadapi masalah sosial (Annisyah Siagian & Susilawati, 2022)

Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove.

Karakteristik umum wilayah laut dan pesisir adalah sebagai berikut.

1. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai "prasarana" pergerakan).
2. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk kepentingan pengelolaan menjadi kurang begitu penting untuk menetapkan batas-batas fisik suatu wilayah pesisir secara kaku (rigid). Akan lebih berarti, jika penetapan batasbatas suatu wilayah pesisir didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan (pemanfaatan) dan pengelolaan ekosistem pesisir dan lautan beserta segenap sumber daya yang ada di dalamnya, serta tujuan dari pengelolaan itu sendiri. Jika tujuan pengelolaan adalah mengendalikan atau menurunkan tingkat pencemaran perairan pesisir yang dipengaruhi oleh aliran sungai, maka batas wilayah pesisir ke arah darat hendaknya mencakup suatu DAS (daerah aliran sungai) dimana buangan limbah akan mempengaruhi kualitas perairan pesisir.

Sementara itu, jika tujuan pengelolaan suatu wilayah pesisir untuk mengendalikan erosi pantai, maka batas ke arah darat cukup hanya sampai pada lahan pantai yang diperkirakan terkena abrasi, dan batas ke arah laut adalah daerah yang terkena pengaruh distribusi sedimen yang paling dekat dengan garis pantai. Dengan demikian, meskipun untuk kepentingan pengelolaan sehari-hari (day to day management) kegiatan pembangunan di lahan atas atau di laut lepas biasanya ditangani oleh instansi tersendiri, namun untuk kepentingan perencanaan pembangunan wilayah pesisir, segenap pengaruh atau keterkaitan tersebut harus dimasukkan pada saat menyusun perencanaan pembangunan wilayah pesisir.

Terdapat definisi wilayah pesisir dalam dua pendekatan, yaitu definisi scientific dan definisi yang berorientasi pada kebijakan.

- a. Menurut definisi scientific, wilayah pesisir yang diibaratkan sebagai pita yang terbentuk dari daratan yang kering dan ruang yang berbatasan dengan laut (air dan tanah di bawah permukaan laut) dimana proses-proses dan pemanfaatan lahan yang terjadi di daratan secara langsung mempengaruhi proses-proses dan pemanfaatan di laut dan sebaliknya. (Ketchum, 1972 dalam Kay dan Alder, 1999).
- b. Definisi yang berorientasi pada kebijakan yang dikemukakan ada dua definisi yaitu:

- 1) Definisi wilayah pesisir mencakup daerah sempit sebagai pertemuan antara darat dan laut yang berkisar antara ratusan dan beberapa kilometer, meluas dari darat mencapai batas perairan menuju batas yurisdiksi nasional di perairan lepas pantai. Definisi ini tergantung pada seperangkat issue dan faktor-faktor geografi yang relevan pada setiap bentangan pesisir yang ada (Hildebrand dan Norena, 1992; Kay dan Alder, 1999).

Manajemen wilayah pesisir melibatkan manajemen yang kontinu dari pemanfaatan lahan di pesisir dan perairan beserta sumber daya yang ada dalam areal yang sudah ditetapkan, dimana batas-batasnya ditetapkan secara politik melalui perundang-undangan atau aturan yang ditetapkan oleh eksekutif (Jones dan Westmacott, 1993).

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik permukiman di wilayah pesisir masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kondisi fisik permukiman, mengatur penggunaan lahan yang terkontrol, dan meningkatkan aksesibilitas di wilayah pesisir. Dengan upaya tersebut, diharapkan wilayah pesisir dapat menjadi wilayah yang berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Masalah lingkungan yang sering dijumpai di kawasan wisata pantai adalah masalah sampah yang mengotori pantai. Ada dua jenis sampah yang mencemari pantai, yaitu sampah dari kegiatan wisata dan sampah dari laut. Hingga saat ini permasalahan sampah di lokasi wisata pantai belum tertangani secara efektif. Sampah jika tidak dikelola dapat menjadi ancaman serius bagi kelangsungan dan keberlanjutan kawasan wisata alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitya, C., & Pigawati, B. (2013). Perubahan Karakteristik Permukiman Pesisir Pada Kawasan Wisata Pantai. *Teknik PWK*, 2(3), 444–456. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/2874>
- Annisyah Siagian, Y., & Susilawati, S. (2022). Pengelolaan lingkungan sebagai upaya mengurangi sampah di kawasan pesisir pantai. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(6), 449–453. <https://doi.org/10.55904/nautical.v1i6.380>
- Christiawan, P. I., & Budiarta, I. G. (2017). Entitas permukiman kumuh di wilayah pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 179.
- Damisi, D. M., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2014). Analisis Faktor-Faktor Kekumuhan Kawasan Permukiman Pesisir Tradisional (Studi Kasus : Desa Bajo Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). *Jurnal Sabua*, 6(1),

163–172. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/SABUA/article/view/5282>

- Dariwu, C. T., & Waani, J. O. (2016). Ekistics Dalam Permukiman Nelayan Pesisir Pantai Sindulang Satu. *Media Matrasain*, 13(2), 1–14.
- Lautetu, L. M., Kumurur, V. A., & Warouw, F. (2019). Karakteristik Permukiman Masyarakat Pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken. *Karakteristik Permukiman Masyarakat Pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken*, 6(1), 126–136.
- Marwasta, D., & Priyono, K. D. (2016). Analisis Karakteristik Permukiman Desa-Desa Pesisir di Kabupaten Kulonprogo. *Forum Geografi*, 21(1), 57–68.
<https://doi.org/10.23917/forgeo.v21i1.1819>
- Putri, G. T., Karmilah, M., Rahman, B., Islam, U., Agung, S., Kulon, T., & Semarang, K. (2023). *Tipologi Permukiman Kumuh Pesisir*. 3(1), 72–104.